

Model Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Eks-Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita di Jawa Timur

Sayekti Suindyah Dwiningwarni^{1*}, Sri Juni Woro Astuti², Suyanto³, Syamsiyah Yuli Dwi Andari⁴

^{1,2,3,4} Universitas Wijaya Putra, Universitas Dr. Soetomo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

Data on ex-Indonesian Migrant Workers (PMI) is unavailable at the central, regional, and regional levels. This is because ex-PMIs never report their whereabouts if they are no longer working abroad, nor do village officials ever collect data on former -PMIs. This differed from PMI's conditions when it became PMI, a foreign exchange supplier for countries, regions, and regions. This research aims to (1) map the condition of ex-PMI women from employment, economic, and social data; (2) formulate a model for alleviating poverty for ex-PMI women. The method used is a survey method and a quantitative approach. This research was conducted in TulungAgung district, with 300 respondents. The data analysis method used is quantitative descriptive. Research results (1) survey results: (a) in the villages of Besole, Besuki, and TanggulTurus, data was found that there were approximately 474 female ex-PMIs, (b) 65.6% of female ex-PMIs had no income, (c) 32.4% ex-PMI Women do not work. (2) MPI calculation results show that Besuki and TanggulTurus villages produce the lowest MPI value, 0.033, while Besole village produces the lowest MPI value, 0.066. This shows that Besuki, TanggulTurus, and Besole villages are in the very low poverty classification.

Keywords: Poverty, ex-PMI Women, Multidimensional Poverty Index.

Korespondensi:

Sayekti Suindyah Dwiningwarni
(sayektisuindyah@gmail.com)

Submit: 20-06-2024

Revisi: 14-08-2025

Diterima: 27-07-2025

Terbit: 22-07-2025



1. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan di Indonesia, salah satu tolak ukurnya adalah menurunnya angka kemiskinan atau angka penduduk miskin (Putri, 2000). Masalah kemiskinan bukan lagi menjadi permasalahan nasional tetapi sudah menjadi masalah dunia. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada bulan September 2022 sebesar 10,49% atau sebanyak 4,236 juta orang (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023). Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diketahui bahwa salah satu penyebab tingginya kemiskinan di Kabupaten Tulungagung adalah Eks-Pekerja Migran Indonesia (PMI) Wanita. Kemiskinan erat hubungannya dengan wanita. Di Afrika Selatan, 60% kepala rumah tangga wanita adalah miskin dibandingkan dengan kepala rumah tangga laki-laki (30%) (Dwiningwarni et al., 2018). Di Kabupaten Malang, sebagian besar PMI yang bekerja di Hongkong ternyata tidak dapat meningkatkan status sosial ekonomi para TKW (Dwiningwarni et al., 2019). Data tentang jumlah eks- PMI Wanita di Jawa Timur belum tersedia, ini disebabkan karena PMI yang kembali ke daerahnya masing-masing dan tidak lagi bekerja ke luar negeri tidak pernah melaporkan keberadaannya (Dwiningwarni et al., 2017).

Penyebab utama terjadinya pengangguran eks-PMI Wanita karena belum adanya peraturan daerah atau peraturan gubernur yang mengatur tentang eks-PMI Wanita, begitu juga di SKPD/OPD. Aturan yang ada mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Timur. Program pemberdayaan yang telah diberikan selama ini kepada eks-PMI Wanita belum pernah ada tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Eks-PMI Wanita memiliki potensi besar, karena eks-PMI Wanita tersebut memiliki pengalaman dalam berbagai macam bentuk (bahasa, ketrampilan, kemandirian, wawasan internasional dan memiliki simpanan diperkirakan sebesar Rp 60 juta sampai dengan Rp 100 juta.

Eks-PMI wanita yang menganggur, akan memunculkan permasalahan yang selama ini masih sulit untuk dipecahkan, yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan besar yang terjadi bagi sebuah negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi standar kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup tersebut adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Aristina et al., 2017; Fauziyah Irawan et al., 2024).

Konsep membuka lapangan kerja dengan green job dalam penelitian ini merupakan konsep yang diadopsi dari konsep turunan dari green economy (Dwiningwarni et al., 2017). Green job merupakan pekerjaan ramah lingkungan. Fenomena green job ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh

perusahaan dan sektor ekonomi hingga ke sektor yang mampu untuk melestarikan lingkungan hidup (Djasuli et al., 2019; Dwiningwarni, 2016; Dwiningwarni et al., 2017; Veeran, 2014). Green job ini mencakup pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem, mengurangi biodiversitas, mengurangi energi, materi dan konsumsi air melalui strategi yang memiliki tingkat efisiensi tinggi; dekarbonisasi perekonomian; serta mengurangi dan mencegah pembuatan segala bentuk limbah dan polusi (Firmansyah, 2022). Menurut sejarah, alur kehidupan manusia dan alam ada beberapa tahapan: pertama, kehidupan manusia dekat dengan alam; kedua, manusia memanfaatkan alam sebagai sumber utama kehidupan, hanya alam dan tenaga kerja sebagai faktor produksi utama (Firmansyah et al., 2007). Hubungan antara manusia dengan alam semakin lama semakin renggang, karena manusia telah menemukan penghidupan lain melalui sektor jasa dan teknologi. Industrialisasi, teknologi dan emas semakin berkembang. Bahkan emas menjadi komoditas yang dijadikan sebagai sumber kekayaan dan transaksi (Cai et al., 2011; Kasztelan, 2017).

Bertambahnya jumlah penduduk, juga menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan energi, buangan CO₂, sandang, pangan, dan papan. Alam menjadi tereksplorasi kembali, lahan pertanian menjadi semakin berkurang, karena menjadi lahan pemukiman dan perkantoran. Sedangkan hutan dan gunung dijadikan lahan pertanian yang berkurang akibat alih fungsi lahan (Bastos et al., 2009; D et al., 2018; Kiaušienė, 2015; UNICEF Ethiopia & Ministry of Women, 2019).

Green job ini diawali dengan green bisnis yang mana green bisnis merupakan langkah penciptaan lapangan kerja yang cerdas untuk masa depan, karena jenis pekerjaan ini sudah membuktikan memberikan kontribusi nilai bisnis mencapai angka US\$1.370 Milyar pada tahun 2020 (ILO, 2022; C. J. Li et al., 2023; Rutkowska & Sulich, 2020; Sulich et al., 2020; Widayana, 2012; Xia et al., 2022). Green employment diperlukan untuk menghindari berbagai krisis lingkungan (ecological) (Bohnenberger, 2022). Teori tentang tenaga kerja yang berkelanjutan itu dimulai dari dua sisi, yaitu: (1) sinergi antara green economy dan promosi pekerjaan yang berkualitas; (2) kritik fundamental terhadap peluang kerja (Bohnenberger, 2022; C. J. Li et al., 2023; S. Li et al., 2023).

Green investment adalah investasi yang mengimplementasi efisiensi energi dan upaya mempercepat dan upaya mempercepat perkembangan sumber energi keterbarukan dari sumber alternatif (Hariyono & Aryati, 2018; Zhang et al., 2023). Dalam perkembangannya, green investment mengalami peningkatan dalam suatu negara, hal ini dikarenakan negara sangat membutuhkan investasi yang bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan. Instrumen yang digunakan dengan memberikan subsidi dan insentif pajak, sehingga ada beberapa aspek investasi yang berpeluang untuk dikembangkan dalam green investment antara lain: (i) forest sector; (ii) eco-tourism; (iii) water resources; (iv) green construction; (v) green transport; (vi) energy sector; (vii) industrial production; (viii) green fishery; dan (ix) agriculture (Chaurasia, 2020; Widayana, 2012).

Kedua konsep tersebut merupakan cikal bakal yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dan pengangguran bagi eks-PMI Wanita. Dengan konsep green job dan green investment ini diharapkan akan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi eks-PMI Wanita yang sebagian besar berusia produktif (15-64) tahun dan bertempat tinggal di pedesaan

Data tentang eks-Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum tersedia baik di tingkat pusat, wilayah dan daerah, hal ini disebabkan karena eks-PMI tidak pernah melaporkan keberadaannya jika tak lagi bekerja ke Luar Negeri, begitu pun pihak desa tidak pernah melakukan pendataan kepada eks-PMI. Ini tidak selaras dengan kondisi PMI saat menjadi PMI, yang merupakan pemasok devisa bagi negara, wilayah dan daerah. Tujuan penelitian ini (1) memetakan kondisi eks-PMI wanita dari data ketenagakerjaan, ekonomi dan sosial; (2) merumuskan model pengentasan kemiskinan eks-PMI wanita.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi sebanyak 500 responden di 3 (tiga) desa di Kabupaten Tulungagung, yaitu desa Besole, desa Besuki dan desa TanggulTurus. Jumlah populasi ini merupakan perkiraan, karena data eks-PMI Wanita tersebut tidak ditemukan. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan model *Multidimensional Poverty Index* (MPI), yaitu alat ukur kemiskinan berupa derajat keparahan kemiskinan dalam berbagai dimensi yang mempengaruhi kapabilitas manusia (Budiantoro et al., 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:
Responden Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 1. Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Usia (tahun)	Sebelum menjadi PMI		Saat Menjadi PMI		Setelah Tidak Menjadi PMI	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	≤ 10	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	11 – 20	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	21 – 30	95	19,0	95	19,0	50	10,0
4	31 – 40	135	27,0	135	27,0	165	33,0
5	41 – 50	195	39,0	195	39,0	225	45,0
6	51 – 60	75	15,0	75	15,0	60	12,0
7	≥ 61	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
	Jumlah	500	100,0	500	100,0	500	100,0

Sumber: data primer, diolah (2023)

Tabel 1 menjelaskan bahwa usia responden sebelum, dan saat menjadi PMI sebagian besar berusia produktif, usia 21-30 tahun (19%), 31-40 tahun (27,0%), 41-50 tahun (39,0%) dan 51-60 tahun (15,0%). Setelah tidak lagi menjadi PMI, sebagian besar responden masih berusia produktif, usia 21-30 tahun (10,0%), 31-40 tahun (33,0%), 41-50 tahun (45,0%) dan 51-60 tahun (12,0%). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden saat memutuskan untuk bekerja ke Luar Negeri, sebagian besar usia responden adalah masuk kategori usia produktif (menurut kriteria BPS).

Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 2. Responden Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Sebelum menjadi PMI		Saat Menjadi PMI		Setelah Tidak Menjadi PMI	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Belum kawin	121	24,0	10	2,0	0	0,0
2	Sudah kawin	342	68,0	235	47,0	435	87,0
3	Janda	37	7,0	255	51,0	65	13,0
	Jumlah	500	100,0	500	100,0	500	100,0

Sumber: Data primer diolah (2023)

Tabel 2 menjelaskan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi PMI berstatus sudah kawin (68,0%), belum kawin (24,0%) dan janda (7,0%). Saat menjadi PMI berstatus janda (51,0%), sudah kawin (47,0%) dan belum kawin (2,0%). Setelah tidak menjadi PMI berstatus sudah kawin (87,0%) dan janda (13%). Ini berarti bahwa pada saat menjadi PMI, kasus perceraian banyak terjadi, karena sebagian besar responden (51%) menjadi janda, ada peningkatan jumlah 44% dibandingkan saat sebelum menjadi PMI. Ini juga diindikasikan bahwa saat bekerja di Luar Negeri yang jauh dari suami atau keluarga akan menjadi pemantik atau alasan untuk bercerai.

Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

Tabel 3. Responden Berdasarkan Status Pekerjaan

No	Pekerjaan	Sebelum menjadi PMI		Saat Menjadi PMI		Setelah Tidak Menjadi PMI	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Pelajar	23	4,6	0	0,0	0	0,0
2	Buruh	15	3,0	0	0,0	0	0,0
3	Wiraswasta	25	5,0	0	0,0	85	17,0
4	Karyawan/Swasta	21	4,2	0	0,0	28	5,6
5	Ibu Rumah Tangga	151	30,2	0	0,0	87	17,4
6	Pedagang	53	10,6	0	0,0	23	4,6
7	Petani	114	22,8	0	0,0	110	22,0
8	PNS/PPPK	0	0,0	0	0,0	5	1,0
9	Asisten Rumah Tangga	0	0,0	395	79,0	0	0,0
10	Perawat lansia/Anak	0	0,0	105	21,0	0	0,0
11	Tidak bekerja	98	19,6	0	0,0	162	32,4
	Jumlah	500	100,0	500	100,0	500	100,0

Sumber: data primer, diolah (2023)

Tabel 3 menjelaskan bahwa sebelum menjadi PMI sebagian besar responden bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) (30,2%), petani (22,8%), tidak bekerja (19,6%), pedagang (10,6%), wiraswasta (5,0%), pelajar (4,6%),

karyawan swasta (4,2%) dan buruh (3,0%). Saat menjadi PMI, sebagian besar responden bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) (79%) dan perawat lansia/anak (21%). Saat tidak lagi menjadi PMI, sebagian besar responden berstatus tidak bekerja (32,4%), peteani (22,0%), IRT (17,4%), wiraswasta (17%), karyawan swasta (5,6%), pedagang (4,6%) dan PNS/PPPK (1,0%).

Ini berarti bahwa sebagian besar responden saat belum menjadi PMI berstatus sebagai IRT dan tidak bekerja (menganggur). Saat memutuskan bekerja ke luar negeri, harapannya dapat meningkatkan perekonomian keluarga responden. Ini didukung dengan alasan responden untuk bekerja ke luar negeri, sebagai berikut:

Tabel 4. Alasan Responden Untuk Menjadi PMI

No	Alasan Bekerja ke LN	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Keluarga	220	44,0
2	Ekonomi	230	46,0
3	Tetangga	50	1,0
	Jumlah	500	100,0

Sumber: Data primer, diolah (2023)

Tabel 4 menjelaskan bahwa alasan responden untuk bekerja ke luar negeri sebagian besar adalah alasan ekonomi (46,0%), keluarga (44,0%) dan ajakan tetangga (1,0%). Ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan keluarga menjadi alasan utama responden untuk bekerja ke luar negeri dengan harapan gajinya tinggi. Namun, masalah yang dihadapi oleh responden adalah (1) mahal biaya keberangkatan ke luar negeri; (2) terjebak dalam pekerja migran yang ilegal; (3) bekerja tanpa adanya jaminan keselamatan dan Kesehatan kerja dari pemerintah Indonesia, maupun pemerintah negeri tujuan; (4) terkena calo penjualan orang.

Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tabel 5. Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

No	Pendapatan (Rupiah)	Sebelum menjadi PMI		Saat Menjadi PMI		Setelah Tidak Menjadi PMI	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	≤ 1juta	111	22,2	0	0,0	115	23,0
2	1,1 – 2 juta	110	22,0	57	11,4	43	8,6
3	2,1 – 3 juta	32	6,7	80	16,0	20	4,0
4	3,1 – 4 juta	20	4,0	98	19,6	0	0,0
5	4,1 – 5 juta	11	2,22	121	24,2	0	0,0
6	≥ 5,1 juta	0	0,0	145	29,0	0	0,0
7	Tidak berpenghasilan	215	43,0	0	0,0	328	65,6
	Jumlah	500	100,0	500	100,0	500	100,0

Sumber: Data primer, diolah (2023)

Tabel 5 menjelaskan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi PMI adalah tidak berpenghasilan (43,0%), berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta (22,2%), Rp 1,1 juta – Rp 2 juta (22,0%), Rp 2,1 juta – Rp 3 juta (6,7%), Rp 3,1 juta-Rp 4 juta (4,0%), Rp 4,1 juta – Rp 5 juta (2,22%). Saat menjadi PMI sebagian besar responden berpenghasilan Rp 4,1 – Rp 5 juta (24,2%) dan berpenghasilan Rp 5,1 juta ke atas (29,0%). Setelah tidak lagi menjadi PMI sebagian besar responden tidak berpenghasilan (65,6%), berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta (23%), berpenghasilan Rp 1,1 juta – Rp 2 juta (8,6%), berpenghasilan Rp 2,1 juta – Rp 3 juta (4%). Ini menunjukkan bahwa pada saat responden sudah tidak lagi menjadi PMI, kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan dengan sebelum menjadi PMI.

Responden Berdasarkan Program Pemberdayaan

Hasil wawancara dan jawaban dalam kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum pernah mendapatkan sentuhan dari pemerintah kabupaten dalam program pemberdayaan apapun. Ini juga disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PP dan PA) Kabupaten Tulung Agung, bahwa pemerintah kabupaten TulungAgung belum pernah merencanakan program pemberdayaan eks-PMI dengan alasan bahwa keterbatasan anggaran yang disediakan, dan sejak tahun 2015, sudah dilakukan pemberdayaan terhadap keluarga PMI dan belum pernah programnya menyentuh eks-PMI maupun keluarga PMI yang berasal dari desa Besole, Besuki dan Tanggulturus kabupaten TulungAgung (hasil wawancara peneliti, 20 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB).

Hasil wawancara ini sesuai dengan hasil wawancara Tim dengan responden eks-PMI Wanita di desa Besole, Besuki dan Tanggulturus kabupaten TulungAgung.

Hasil Perhitungan Multidimensional Poverty Index (MPI)

MPI adalah Indeks Kemiskinan Multidimensi merupakan alat ukur kemiskinan berupa derajat keparahan kemiskinan dalam berbagai dimensi yang mempengaruhi kapabilitas manusia (Budiantoro et al., 2013). MPI pertama kali dikembangkan oleh OPHI dengan UNDP tahun 2010. Yang mana tujuan dari MPI adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistic. Perhitungan MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari dimensi dan indikator. Ada tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI (Budiantoro et al., 2013), antara lain: (1) Dimensi Kesehatan. Untuk dimensi kesehatan digunakan dua indikator untuk mengukurnya, yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya dua indikator ini dalam Kesehatan merupakan indikator dasar. Pengukuran MPI untuk indikator gizi: untuk anak dan dewasa. Untuk anak MPI mengukur dengan pendekatan berat badan anak berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standar deviasi rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan Body Mass Index (BMI), yang mana orang dewasa dikatakan kurang gizi, jika BMI lebih rendah dari 18,5 (Budiantoro et al., 2013; Indira Rukmi et al., 2019; United Nations Development Programme, 2016). Indikator kedua adalah kematian anak. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur rumah tangga yang memiliki kematian anak satu, dua atau seterusnya, maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian MPI. (2) Dimensi Pendidikan, MPI menggunakan dua indikator dalam mengukur dimensi Pendidikan, yaitu lama sekolah (years schooling) dan akses terhadap Pendidikan (attendance school). MPI mengukur lama Pendidikan adalah minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang menyelesaikan Pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses atau hadir dalam Pendidikan (akses). (3) Dimensi Standar Hidup, MPI mengukur dimensi standar hidup dengan enam indikator, yaitu: (a) air. Seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, kran umum, sumur bora tau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit baerjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air; (b) sanitasi. Seseorang dianggap memiliki akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapajenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik itu toilet kompos, asalkan tidak dibagi. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi; (c) listrik. Seseorang dianggap miskin, jika tidak memiliki akses listrik; (d) lantai rumah. Bahan lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin; (e) bahan bakar untuk memasak. Seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu; dan (f) kepemilikan asset. Jika sebuah rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil, maka dianggap miskin. Dimensi, Indikator dan bobot MPI, sebagai berikut:

Tabel 6. Dimensi, Indikator dan Bobot MPI

Dimensi	Indikator	Terdeprivasi, jika...	Bobot
Pendidikan (education)	Tingkat Pendidikan terakhir (school attainment)	Tidak terdapat eks-PMI Wanita yang menempuh Pendidikan minimal	16,7%
	Kehadiran partisipasi dalam sekolah (attendance of school)	Terdapat anak usia pelajar yang tidak sekolah	16,7%
Kesehatan (Health)	Gizi (nutrition)	Terdapat anggota keluarga yang mengalami malnutrisi	16,7%
	Kematian anak (child mortality)	Terdapat Riwayat anak yang meninggal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir	16,7%
Standar Hidup (standarof living)	Air bersih (drinking water)	Rumah tangga tidak memiliki akses air bersih layak/sumber air bersih layak	5,6%
	Sanitasi (Sanitation)	Rumah tangga memiliki jenis sanitasi yang tidak layak atau jenis sanitasi layak namun berbagi / dipakai bersama dengan rumah tangga lainnya	5,6%
	Listrik (electricity)	Rumah tangga tidak memiliki kses listrik	5,6%
	Jenis lantai (Floor)	Rumah tangga yang memiliki lantai dari pasir, tanah, atau kotoran	5,67%

Bahan Bakar untuk memasak (Cooking Fuel)	Eks-PMI wanita menggunakan arang, briket, kayu bakar, minyak tanah	5,6%
Kepemilikan (asset)	Eks-PMI Wanita yang minimal tidak memiliki salah satu dari asset	5,6%

Sumber: UNDP (2016)

Hasil pengukuran dimensi MPI, sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan

Tabel 7. Dimensi Kesehatan di Desa Besuki, TanggulTurus dan Besole Kecamatan Besuki Kabupaten TulungAgung

Desa	Jumlah Responden	Jumlah Balita Mal Nutrisi	Tingkat Kematian Bayi
Besuki	100	0%	0%
Tanggul Turus	100	0%	0%
Besole	100	0%	0%

Sumber: Hasil survei, September (2023)

Tabel 7 menunjukkan bahwa di desa besuki, TanggulTurus, dan Besole tidak pernah terjadi kematian bayi ataupun balita mal nutrisi. Ini membuktikan bahwa eks-PMI Wanita, walaupun sudah tidak bekerja lagi di luar negeri, masih mampu bertahan hidup dengan berbagai cara yang halal (misalnya bercocok tanam dan lain-lain).

Dimensi Pendidikan

Tabel 8. Dimensi Pendidikan Eks-PMI Wanita dan Keluarga di desa Besuki, TanggulTurus dan Besole Kecamatan Besuki Kabupaten TulungAgung

Desa	Jumlah Responden	Eks-PMI Wanita Yang Tidak Lulus Pendidikan Minimal SMA	Tingkat partisipasi
Besuki	100	1%	0%
Tanggul Turus	100	1%	0%
Besole	100	2%	0%

Sumber: Hasil survei, September (2023)

Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah eks-PMI Wanita yang tidak lulus pendidikan minimal SMA tertinggi di desa Besole (2%), sedangkan untuk desa Besuki dan TnggulTurus menunjukan angka yang sama yaitu 1%. Sedangkan untuk parameter partisipasi seluruh desa memiliki nilai 0% artinya tidak ada anak dari eks-PMI Wanita yang usia sekolah yang tidak sekolah.

Dimensi Standar Hidup

Dimensi standar hidup dalam penelitian ini, menggunakan enam indikator untuk standar hidup, mencakup tiga standar indikator Millineum Development Goals (MDG) yang terkait dengan kesehatan dan standar hidup seperti akses air bersih, sanitasi, dan penggunaan bahan bakar memasak. Pembeneran untuk indikator ini adalah cukup disajikan dalam literatur MDG. Hal ini juga mencakup dua non MDG-indikator: listrik dan material lantai. Kedua indikator memberikan beberapa indikasi dasar dari kualitas perumahan untuk rumah tangga. Indikator akhir meliputi kepemilikan beberapa barangbarang yang menunjang akses informasi seperti telepon, radio, TV, menunjang mobilitas seperti mobil, sepeda motor dan mwnunjang hidup seperti hewan ternak, kepemilikan lahan. Berikut ini merupakan hasil dari dimensi standar hidup. Berikut dimensi standar hidup di desa Besuki, TanggulTurus dan Besole Kecamatan Besuki Kabupaten tulungAgung

Tabel 9. Dimensi Standar Hidup Di Desa Besuki, tanggul Turus, Besole Kecamatan Besuki Kabupaten TulungAgung

Desa	Jumlah Responden	Sumber Penerangan	Akses ke Air Bersih	Kondisi Sanitasi
Besuki	100	0	1	2
Tanggul Turus	100	0	1	2
Besole	100	0	1	2

Sumber: hasil survei, September (2023)

3.2 Pembahasan

Hasil pemetaan kondisi eks-PMI wanita dari sisi ketenagakerjaan, yaitu berdasarkan kelompok umur adalah sebagian besar eks-PMI Wanita sebelum, saat dan setelah tidak lagi bekerja di luar negeri merupakan tenaga

kerja yang termasuk dalam usia produktif menurut indikator pengukuran yang dikeluarkan oleh BPS. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Darwati, 2022; Dwiningwarni, 2016), yang menyatakan bahwa sebagian besar PMI wanita yang bekerja ke luar negeri berusia antara 20-50 tahun, ini merupakan usia produktif, dan kondisi ini sangat merugikan bagi daerah penghasil PMI.

Kondisi eks-PMI Wanita berdasarkan status perkawinan menunjukkan bahwa sebagian besar eks-PMI Wanita, sebelum berangkat ke luar negeri untuk bekerja statusnya sudah menikah (68%), sedangkan saat bekerja di luar negeri sebagian besar statusnya adalah janda (51%), ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi daerah asal eks-PMI Wanita, karena meningkatkan jumlah angka perceraian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Suryadi et al., 2022). Namun, permasalahan tersebut dapat berkurang, saat eks-PMI Wanita tak lagi bekerja ke luar negeri.

Eks-PMI Wanita ditinjau dari status pekerjaan, menunjukkan bahwa sebelum berangkat bekerja ke luar negeri sebagian besar eks-PMI Wanita bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (30,2%), petani (22,8%) dan tidak bekerja (19,6%). Ini menunjukkan bahwa sebelum menjadi PMI, kondisi ekonomi para eks-PMI Wanita adalah miskin. Saat bekerja di luar negeri, sebagian besar eks-PMI Wanita bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (79%) dan perawat anak (21%). Setelah mereka tak lagi bekerja di luar negeri, sebagian besar eks-PMI Wanita tidak bekerja (32,4%), menjadi ibu rumah tangga (17,4%), petani (22%), wiraswasta (17%). Hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari status pekerjaan baik sebelum, saat dan setelah menjadi PMI, sebagian besar bekerja pada sektor-sektor domestic, yang memiliki kualitas SDM yang rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Devanto et al., n.d.; Sembiring & Agustin, 2023; Sutaat et al., 2011). Kondisi eks-PMI Wanita setelah tak lagi bekerja ke luar negeri menjadi pengangguran, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah daerah maupun pusat, karena kondisi ini akan menyebabkan meningkatkan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan di daerah asal eks-PMI Wanita.

Jika dilihat dari sisi pendapatan, maka sebagian besar eks-PMI Wanita sebelum menjadi PMI tidak memiliki pendapatan (pengangguran) sebesar 43%, dan berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta (22,2%), serta berpendapatan Rp 1,1 juta sampai Rp 2 juta (22%). Ini menunjukkan bahwa secara ekonomi kondisi eks-PMI Wanita sebelum menjadi PMI sangat memprihatinkan karena berada di bawah garis kemiskinan di daerah asal. Namun, kondisi ini berbanding terbalik, saat eks-PMI Wanita menjadi PMI, penghasilan rata-rata di atas Rp 5 juta, kondisi ini sangat dapat membantu dan merubah kondisi ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Kondisi membaiknya perekonomian ini tidak berlangsung lama, jika PMI tersebut tidak pandai-pandai dalam mengelola keuangannya. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi eks-PMI Wanita setelah tak bekerja lagi di luar negeri, yaitu kembali tidak berpenghasilan (65%) dan berpenghasilan kurang dari Rp 1 juta (23%). Kondisi ini menyebabkan eks-PMI Wanita kembali menjadi penduduk yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Abas et al., 2016; Devanto et al., n.d.; Latifah et al., 2016).

Jika dilihat dari alasan untuk bekerja ke luar negeri, sebagian besar eks-PMI Wanita beralasan karena ekonomi (46%) dan keluarga (44%), sedangkan untuk alasan karena diajak tetangga hanya 1%. Ini menunjukkan bahwa desakan kondisi ekonomi dan nasib keluarga yang termasuk dalam golongan miskinlah yang menjadi factor utama untuk bekerja ke luar negeri, dengan harapan akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan jika bekerja di daerahnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Baniadi & Mustofa, 2018; Khaliq & Uspr, 2017; Varghese & Roy, 2023).

Keadaan eks-PMI Wanita yang tidak lagi kembali bekerja ke luar negeri ini juga disebabkan karena: (1) Sentuhan program pemberdayaan terhadap eks-PMI Wanita yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah masih belum merata, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran, dan (2) SKPD yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat, maupun pemberdayaan perempuan belum secara khusus memasukan program kerja pemberdayaan eks-PMI Wanita dalam anggaran.

Hasil pengukuran dimensi MPI menunjukkan bahwa jika ditinjau dari pengukuran dimensi Pendidikan, maka sebagian besar eks-PMI Wanita sudah baik, karena tingkat partisipasinya adalah 0%, artinya tidak ada anak dari eks-PMI Wanita yang usia sekolah, tidak sekolah. Ini berarti, eks-PMI Wanita memiliki perhatian yang besar terhadap tingkat pendidikan anak-anaknya, walaupun mereka tak lagi bekerja di luar negeri. Jika ditinjau dari pengukuran dimensi Kesehatan, kondisi Kesehatan eks-PMI Wanita di desa Besole, Tanggul Turus dan Besuki kecamatan Besuki Kabupaten TulungAgung, dalam kondisi sehat, ini ditunjukkan dengan tidak pernah terjadi kematian bayi ataupun balita mal nutrisi. Ini membuktikan bahwa walaupun eks-PMI Wanita tidak lagi bekerja ke luar negeri dan memperoleh penghasilan yang besar, namun mereka masih dapat bertahan hidup dengan berbagai cara yang halal (misalnya bercocok tanam, beternak, Bertani dan lain-lain). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Budiantoro et al., 2013; Indira Rukmi et al., 2019; Varghese & Roy, 2023).

Dimensi standar hidup menunjukkan bahwa untuk sumber penerangan sudah terjangkau oleh eks-PMI Wanita, akses ke air bersih masih ada kendala, karena sebagian besar eks-PMI Wanita, masih suka menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena air PDAM masih belum dapat menjangkau di

pedesaan. Kondisi sanitasi, juga masih sangat kurang, karena sebagian besar eks-PMI Wanita membangun atau merenovasi rumahnya penuh dengan dinding tembok tinggi, sehingga sanitasi sulit masuk ke rumah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Budiantoro et al., 2013; Varghese & Roy, 2023) .

4. Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Pemetaan kondisi eks-PMI Wanita dari ketenagakerjaan, sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa eks_PMI Wanita, kondisi sebelum, saat dan setelah tidak lagi menjadi PMI sangat berbeda. Pemetaannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan usia

Sebagian besar eks-PMI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri termasuk dalam kelompok tenaga kerja usia produktif berdasarkan pengukuran dari BPS, yaitu usia 10-60 tahun. Kondisi ini tidak berubah saat bekerja di luar negeri dan saat menjadi eks-PMI Wanita.

2. Berdasarkan status perkawinan

Sebelum menjadi PMI, sebagian besar berstatus menikah, saat bekerja di luar negeri sebagian besar berstatus janda, dan saat menjadi eks-PMI Wanita sebagian besar berstatus menikah.

3. Berdasarkan status pekerjaan

Sebelum menjadi PMI, sebagian besar tidak bekerja, Ibu Rumah Tangga dan petani. Saat bekerja di luar negeri sebagian besar bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan perawat lansia/anak. Setelah tidak bekerja di luar negeri sebagian besar Kembali tidak bekerja, menjadi IRT dan petani.

4. Berdasarkan pendapatan

Sebelum berangkat ke luar negeri sebagian besar tidak berpendapat, dan berpendapat kurang dari Rp 4 juta. Saat menjadi PMI, sebagian besar berpenghasilan di atas Rp 5 juta. Saat tidak lagi menjadi PMI, sebagian besar Kembali tidak berpenghasilan dan berpenghasilan di bawah Rp 1 juta.

5. Berdasarkan alasan bekerja ke luar negeri

Alasan untuk menjadi PMI, karena ekonomi dan keluarga. Ekonomi yang pas-pasan dan keluarga yang masuk golongan keluarga miskin (Pra Sejahtera).

Hasil pengukuran MPI dengan menggunakan tiga dimensi adalah sebagai berikut:

1). Dimensi Pendidikan

Hasil pengukuran MPI dengan menggunakan dimensi Pendidikan adalah eks-PMI Wanita di desa Besole, Besuki dan Tanggulturus kecamatan Besuki kabupaten TulungAgung adalah sangat memperhatikan Pendidikan anak-anaknya, ini dibuktikan bahwa anak eks-PMI Wanita di daerah tersebut yang termasuk dalam usia sekolah, tidak ada yang tidak sekolah.

2). Dimensi Kesehatan

Hasil pengukuran MPI dengan menggunakan dimensi Kesehatan adalah eks-PMI Wanita di desa Besole, Besuki dan Tanggulturus kecamatan Besuki kabupaten TulungAgung sangat memperhatikan kesehatan diri sendiri dan keluarga, ini dibuktikan dengan tidak ada kematian bayi atau pun mal nutrisi.

3). Dimensi Standar Hidup

Hasil pengukuran MPI dengan menggunakan dimensi standar hidup adalah eks-PMI Wanita di desa Besole, Besuki dan Tanggulturus kecamatan Besuki kabupaten TulungAgung adalah untuk akses ke sumber penerangan tidak ada kendala, sedangkan akses ke air bersih masih ada kendala, namun tidak berat kendalanya, serta untuk akses sanitasi kendalanya masih cukup besar.

4.2 Saran

1. Perlu adanya campur tangan pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder dalam upaya pemberdayaan eks-PMI Wanita dan keluarganya secara merata.
2. Perlu adanya program dari pemerintah daerah dan pusat yang secara langsung berkaitan dengan eks-PMI Wanita.
3. Merujuk pada hasil pengukuran dimensi MPI, maka perlu adanya campur tangan pemerintah daerah untuk membantu warga agar mudah mengakses air bersih dan sanitasi.

Referensi

Abas, S., Widyahseno, B., & Rudianto. (2016). Model Pemberdayaan Tki Pasca Migrasi Melalui Ekonomi Produktif Menuju Keluarga Sakinah. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 4(1), 1–19. <https://doi.org/10.24269/MUADDIB.V4I1.92>

- Aristina, I., Budhi, M. K. S., & Wirathi, I. G. A. P. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(5), 677–708.
- Baniadi, P., & Mustofa. (2018). KEMISKINAN MULTIDIMENSI DI KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(1), 13–20.
- Bastos, A., Casaca, S. F., Nunes, F., & Pereirinha, J. (2009). Women and poverty: A gender-sensitive approach. *Journal of Socio-Economics*, 38(5), 764–778. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2009.03.008>
- Bohnenberger, K. (2022). Is it a green or brown job? A Taxonomy of Sustainable Employment. *Ecological Economics*, 200. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107469>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023.
- Budiantoro, S., Fanggidae, V., Saputra, W., Maftuchan, A., & Artha, D. R. P. (2013). Multidimensional Poverty Index (MPI): Konsep dan Pengukurannya di Indonesia.
- Cai, W., Wang, C., Chen, J., & Wang, S. (2011). Green economy and green jobs: Myth or reality? The case of China's power generation sector. *Energy*, 36(10), 5994–6003. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2011.08.016>
- Chaurasia, A. (2020). Population effects of increase in world energy use and CO2 emissions: 1990–2019. *The Journal of Population and Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.3197/jps.2020.5.1.87>
- D, S. S., Reni, A., Titi, Mulyati, T., & Muhammad Yusuf. (2018). Women and Poverty (a Study in Foreign TKW in Tulung Agung Regency). *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 92(Icamed), 586–594.
- Darwati. (2022). PELAKSANAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1). <https://buruhmigran.or.id/2015/10/09/berbagai-permasalahan-buruh-migran-indonesia-di-malaysia/>
- Devanto, G. C., Pratomo, S., & Si, M. (n.d.). Analisis Terhadap Minat Kerja TKI Purna di Indonesia.
- Djasuli, M., Zulkarnain, I., Prananta, A. W., & Indah, M. (2019). Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Melalui Koperasi Purna TKW di Kabupaten Malang. *Pamator Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i1.5178>
- Dwiningwarni, S. S. (2016). Ex-Migrant Worker: An Assesment Problem (Study In The District Tulung Agung). *International Conference on Economics, Business and Social Sciences (ICEBUSS) 2016*, 122.
- Dwiningwarni, S. S., Ariyanto, A., & Yusuf, M. (2018). Population, Unemployment and Povert : A Population Analysis in East Java Indonesia. In *Sampurna University (Ed.), SU-AFBE. EAI*. <https://doi.org/10.4108/eai.6-12-2018.2286278>
- Dwiningwarni, S. S., Aslichah, A., Ariyanto, A., Titin, T., & Yusuf, M. (2019). Population, Unemployment and Poverty: A Population Analysis in East Java Indonesia. *Proceedings of the 1st Sampurna University-AFBE International Conference, SU-AFBE 2018, 6-7 December 2018, Jakarta Indonesi*, 04(09), 6–8. <https://doi.org/10.4108/eai.6-12-2018.2286278>
- Dwiningwarni, S. S., Reni, A., Titin, Mulyati, T., & Muhammad Yusuf. (2017). Woman and Poverty (a Study in Foreign TKW in TulungAgung Regency). *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, Volume 92 3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018) Women, 40(Icamed), 400–406.
- Fauziah Irawan, F., Junaidi, J., Studi, P., Fakultas, A., & Dan Bisnis, E. (2024). Analysis Of The Effect Of Social Assistance And Capital Expenditure On Poverty. In *Jurnal Ekonomi (Vol. 1)*.
- Firmansyah, M. (2022). Konsep Turunan Green economy dan Penerapannya: Sebuah Analisis Literatur. 5(2), 141–149.
- Firmansyah, M., Setyorini Gunawan, D., & Ekonomi Universitas Mataram, F. (2007). ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN DEGRADASI LINGKUNGAN (Vol. 2, Issue 2).
- Hariyono, P., & Aryati, V. D. (2018). RELASI MANUSIA DAN ALAM. In *Jurnal Neo Teknik* (Vol. 4, Issue 2).
- ILO. (2022). Pekerjaan Yang Layak dan Ramah Lingkungan di Indonesia. www.ilo.org/jakarta
- Indira Rukmi, W., Rini Dwi Ari, I., & Lairatri Prabandari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, A. (2019). MULTIDIMENSIONAL POVERTY INDEX DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG. In *Jurnal Tata Kota dan Daerah (Vol. 11, Issue 2)*.
- Kasztelan, A. (2017). Green growth, green economy and sustainable development: Terminological and relational discourse. *Prague Economic Papers*, 26(4), 487–499. <https://doi.org/10.18267/j.pap.626>
- Khaliq, A., & Uspri, B. (2017). KEMISKINAN MULTIDIMENSI DAN PERLINDUNGAN SOSIAL. 13(2), 85–191. <http://journal.ubm.ac.id/>
- Kiaušienė, I. (2015). Comparative assessment of women unemployment and poverty in European Union. *Intellectual Economics*, 9(2), 91–101. <https://doi.org/10.1016/j.intele.2015.12.001>

- Latifah, S. W., Jati, A. W., & Erna Retna R. (2016). Pemberdayaan Mantan Tki Melalui Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2(1), 67–80.
- Li, C. J., Razzaq, A., Irfan, M., & Luqman, A. (2023). Green innovation, environmental governance and green investment in China: Exploring the intrinsic mechanisms under the framework of COP26. *Technological Forecasting and Social Change*, 194, 122708. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122708>
- Li, S., Chang, G., & Zunong, R. (2023). Does regional digital economy development influence green investment? *Innovation and Green Development*, 2(3), 100053. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2023.100053>
- Putri, A. M. P. (2000). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301. <https://core.ac.uk/download/pdf/35390299.pdf>
- Rutkowska, M., & Sulich, A. (2020). Green Jobs on the background of Industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 176, 1231–1240. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.132>
- Sembiring, R. A., & Agustin, M. (2023). Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia secara Partisipatif untuk Mengurangi Pengangguran di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 5(1), 26–40. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v5i1.1478>
- Sulich, A., Rutkowska, M., & Popławski. (2020). Green jobs, definitional issues, and the employment of young people: An analysis of three European Union countries. *Journal of Environmental Management*, 262. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110314>
- Suryadi, Kasturi, & Yusmanto. (2022). Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind). *EMPOWER Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(1), 126–141.
- Sutaat, Setiti, S. G., Widodo, N., & Unayah, N. (2011). PENDAMPINGAN SOSIAL BAGI CALON PEKERJA MIGRAN DAN KELUARGANYA DI DAERAH ASAL Studi Masalah dan Kebutuhan. Masalah TKI. <http://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/55d64f5ebd771499163e1c67b9f8119ffd.pdf>
- UNDP. (2016). Briefing note for countries on the 2023 Multidimensional Poverty Index. <https://hdr.undp.org/mpi-2023-faqs>.
- UNICEF Ethiopia, & Ministry of Women, C. and Y. (2019). Gender Equality, Women’s Empowerment and Child Wellbeing in Ethiopia. UNICEF.
- United Nations Development Programme. (2016). Human development report 2016: Human development for everyone.
- Varghese, J., & Roy, S. (2023). Empirical analysis of poverty in India using multidimensional poverty index. *Journal of Public Health and Primary Care*, 4(2), 63. https://doi.org/10.4103/jphpc.jphpc_1_20
- Varghese, J., & Roy, S. (2023). Measuring rural poverty with a multidimensional approach: The Rural Multidimensional Poverty Index. *Journal of Public Health and Primary Care*, 4(2), 62–68. <https://doi.org/10.4060/cb8269en>
- Veeran, V. (2014). Feminization of Poverty. *The Encyclopedia of Political Science*, July 2000. <https://doi.org/10.4135/9781608712434.n574>
- Widayana, G. (2012). PEMAFAATAN ENERGI SURYA. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Pendidikan (JPTK)*, 9(1), 37–46. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2876/2378>
- Xia, L., Gao, S., Wei, J., & Ding, Q. (2022). Government subsidy and corporate green innovation - Does board governance play a role? *Energy Policy*, 161. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112720>
- Zhang, X., Huang, J., & Shen, C. (2023). Retailers’ incentives for green investment in differentiated competition channels. *Journal of Management Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1016/j.jmse.2023.03.002>